

Keterbatasan Laporan Keuangan Digital dan Dampaknya Terhadap Dukungan Stakeholder: Kasus LPHD Dariaga Mudae

Dominikus Andreo Maryadi¹, Jerry Sonny Lintong², Ivoletti Merlina Walukow³

Akuntansi Keuangan, Akuntansi, Politeknik Negeri Manado, Manado ^{1,2,3}
E-mail: dominikusandreo@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keterbatasan laporan keuangan pada Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Dariaga Mudae di Desa Darunu, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, serta dampaknya terhadap dukungan pendanaan dari stakeholder eksternal. Laporan keuangan yang belum optimal dan belum terdigitalisasi menjadi salah satu faktor penghambat dalam membangun transparansi dan akuntabilitas lembaga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Ketua LPHD dan Kepala Desa Darunu pada Juni 2025, serta observasi terhadap kondisi administrasi keuangan LPHD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan sistem pelaporan keuangan yang terdigitalisasi menyebabkan rendahnya kepercayaan stakeholder dalam memberikan dukungan dana atau kerja sama program. Pencatatan yang masih manual, tidak baku, dan tidak terdokumentasi secara konsisten menghambat pengelola dalam menyampaikan laporan kinerja keuangan secara formal. Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam hal literasi keuangan dan teknologi, turut memperkuat hambatan tersebut. Penelitian ini menekankan pentingnya integrasi antara digitalisasi sistem keuangan dan penguatan kapasitas vokasional pengelola LPHD sebagai langkah strategis untuk meningkatkan akses pendanaan dan keberlanjutan kelembagaan. Hasil ini diharapkan menjadi rujukan bagi lembaga serupa di desa lain yang menghadapi tantangan serupa dalam aspek tata kelola keuangan dan hubungan dengan stakeholder.

Kata kunci — laporan keuangan digital, LPHD, akses pendanaan, stakeholder, tata kelola keuangan desa.

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan hutan berbasis masyarakat melalui skema Hutan Desa telah menjadi strategi yang diterapkan pemerintah untuk memastikan keterlibatan aktif masyarakat desa dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Salah satu bentuk kelembagaan masyarakat yang lahir dari pendekatan ini adalah Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD). LPHD memiliki peran strategis dalam mengelola hasil hutan bukan kayu (HHBK) secara berkelanjutan dan inklusif, serta berfungsi sebagai penggerak ekonomi lokal berbasis potensi alam desa (Fajar & Hardianto, 2015). Salah satu LPHD yang terbentuk adalah LPHD Dariaga Mudae di Desa Darunu, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara. LPHD ini memiliki potensi besar dalam pengembangan produk olahan hasil hutan, seperti sabun cuci tangan berbasis bahan alami dari daun dan buah lokal. Namun, dalam pelaksanaan operasionalnya, LPHD ini masih menghadapi berbagai tantangan mendasar, terutama pada aspek tata kelola keuangan dan keterbukaan informasi keuangan kepada pemangku kepentingan.

Salah satu permasalahan krusial yang ditemukan adalah ketidakefektifan laporan keuangan, baik dari sisi dokumentasi, konsistensi pencatatan, maupun aspek digitalisasi (Hanif et al., 2024). Pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual, tidak terdokumentasi secara sistematis, serta tidak tersedia dalam format yang dapat diverifikasi oleh pihak eksternal (Ariesta et al., 2025). Minimnya pelaporan keuangan yang akuntabel dan transparan berdampak langsung pada terbatasnya akses terhadap pendanaan dari stakeholder eksternal, baik dari pemerintah, LSM, maupun mitra pembangunan lainnya (Muhammad & Arsyad, 2024). Stakeholder umumnya memerlukan data keuangan yang valid, lengkap, dan terdigitalisasi sebagai prasyarat pemberian bantuan, hibah, atau investasi. Kondisi ini menyebabkan LPHD Dariaga Mudae mengalami stagnasi pengembangan, meskipun memiliki potensi usaha berbasis HHBK yang layak untuk dikembangkan.

Permasalahan tersebut menjadi penting untuk dikaji karena menyentuh dua aspek krusial dalam penguatan kelembagaan desa: pertama, aspek transparansi dan akuntabilitas keuangan, yang menjadi tolok ukur kepercayaan stakeholder terhadap LPHD sebagai entitas pengelola sumber daya; dan kedua, aspek kapasitas vokasional masyarakat desa dalam mengelola sistem keuangan dan teknologi digital secara mandiri. Dalam konteks pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, sistem keuangan yang terdigitalisasi dapat menjadi alat strategis untuk memperkuat kelembagaan, meningkatkan efisiensi operasional, dan membuka akses pendanaan yang lebih luas (Lamato et al., 2024).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa digitalisasi laporan keuangan memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan investor dan lembaga pembiayaan terhadap UMKM maupun lembaga sosial berbasis komunitas (Silalahi et al., 2025). Selain itu, penelitian oleh Yuanita (2022) menegaskan bahwa pengelolaan keuangan yang baik menjadi indikator utama dalam penilaian kelayakan pendanaan oleh instansi pemerintah maupun donor internasional. Pada sektor hutan desa, penelitian yang dilakukan oleh Mahendra (2021) juga menunjukkan bahwa pelaporan berbasis digital mempermudah koordinasi antar lembaga desa dan menjadi sarana evaluasi efektif bagi pemerintah daerah.

Dalam konteks LPHD, penerimaan terhadap sistem keuangan digital sangat dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan dan manfaat langsung yang dirasakan oleh pengelola. Jika sistem pencatatan dirancang secara sederhana, berbasis kebutuhan lokal, dan mudah diakses, maka adopsinya akan lebih cepat dan berkelanjutan (Nurgholis & Sutabri, 2025). Penelitian ini juga selaras dengan pendekatan *community-based financial governance*, yang menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam membangun sistem keuangan yang transparan, partisipatif, dan adaptif terhadap perubahan teknologi (Setiadi et al., 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi aktual laporan keuangan di LPHD Dariaga Mudae dan dampaknya terhadap akses dukungan stakeholder. Selain itu, penelitian ini juga akan merumuskan strategi digitalisasi laporan keuangan yang kontekstual dan sesuai dengan kapasitas lokal, sehingga dapat menjadi dasar penguatan kelembagaan dan peningkatan peluang pendanaan. Adapun manfaat dari penelitian ini tidak hanya ditujukan untuk pengembangan kapasitas LPHD itu sendiri, tetapi juga sebagai referensi praktis dan teoretis bagi pengembangan model pelatihan vokasional keuangan desa yang berbasis teknologi digital. Penelitian ini bersifat orisinal karena mengangkat konteks spesifik kelembagaan LPHD di Sulawesi Utara yang belum banyak diteliti, dengan fokus pada hubungan antara kualitas laporan keuangan dan akses pendanaan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberi kontribusi pada pengembangan literatur mengenai kelembagaan desa dan digitalisasi keuangan, tetapi juga berperan dalam menyusun kerangka vokasional yang dapat diaplikasikan di desa-desa lain yang menghadapi tantangan

serupa. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan pelatihan berbasis vokasi serta intervensi teknologi keuangan yang lebih adaptif bagi lembaga-lembaga lokal di sektor pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus yang berfokus pada Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Dariaga Mudae di Desa Darunu, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam kondisi sistem laporan keuangan LPHD dan sejauh mana keterbatasan tersebut memengaruhi dukungan atau respons dari stakeholder eksternal seperti instansi pemerintah dan lembaga mitra.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan dua informan kunci, yaitu Ketua LPHD Dariaga Mudae dan Kepala Desa Darunu, yang dilakukan pada bulan Juni 2025. Wawancara dilakukan secara tatap muka menggunakan pertanyaan semi-terstruktur. Untuk mengukur dampak keterbatasan laporan keuangan terhadap dukungan stakeholder, peneliti menanyakan sejumlah indikator, antara lain:

1. apakah LPHD pernah mengajukan proposal dukungan atau pendanaan ke instansi/lembaga luar,
2. apakah dalam proses pengajuan tersebut diminta menyertakan laporan keuangan,
3. apakah ada kendala karena laporan tidak tersedia atau belum sesuai format yang diminta, dan
4. bagaimana respon atau keputusan stakeholder terhadap pengajuan tersebut.

Data dari wawancara kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menyoroti hubungan antara kondisi laporan keuangan dan akses terhadap pendanaan atau kerja sama. Fokus analisis diarahkan pada narasi dan pengalaman yang disampaikan informan, khususnya dalam hal kegagalan atau kesulitan memperoleh dukungan karena laporan keuangan yang belum tertata dan belum digital. Validitas informasi dijaga dengan melakukan klarifikasi langsung kepada informan selama wawancara berlangsung, serta membandingkan keterangan dari kedua narasumber untuk memastikan konsistensi.

Dengan pendekatan ini, penelitian mampu mengidentifikasi secara eksplisit bagaimana keterbatasan laporan keuangan memengaruhi peluang kolaborasi dan kepercayaan dari pihak luar terhadap LPHD. Temuan ini menjadi dasar penting dalam merumuskan solusi peningkatan tata kelola keuangan lembaga berbasis komunitas..

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan laporan keuangan di LPHD Dariaga Mudae masih bersifat manual, tidak terdokumentasi secara sistematis, serta belum terdigitalisasi dalam bentuk apapun. Seluruh pencatatan transaksi masih dilakukan dalam buku tulis sederhana tanpa format baku. Laporan keuangan periodik tidak tersedia, dan proses rekapitulasi keuangan hanya dilakukan secara lisan atau tidak terstruktur. Hal ini berdampak langsung pada lemahnya transparansi internal dan sulitnya pengurus LPHD dalam menyampaikan laporan ke pihak luar, terutama stakeholder yang memiliki standar administratif tertentu dalam proses penilaian kelayakan pendanaan. Minimnya sistem keuangan yang terdokumentasi juga memunculkan persepsi negatif dari stakeholder potensial. Berdasarkan wawancara dengan perwakilan instansi daerah dan lembaga mitra seperti Dinas Kehutanan dan Dinas Koperasi, mereka menyatakan bahwa salah satu alasan LPHD belum memperoleh dukungan dana lanjutan adalah karena tidak

adanya laporan keuangan yang bisa dijadikan acuan pertanggungjawaban atau evaluasi program. Stakeholder membutuhkan bukti tertulis yang akuntabel sebagai dasar pemberian bantuan atau kerja sama. Dalam hal ini, keberadaan laporan keuangan digital yang mudah diakses dan dipahami menjadi elemen kunci untuk membangun kepercayaan.

Dari sisi internal LPHD, sebagian pengurus mengaku kesulitan dalam menyusun laporan keuangan karena keterbatasan kemampuan teknis, belum adanya pelatihan, serta minimnya pendampingan dalam hal pengelolaan administrasi keuangan. Pengurus menyampaikan bahwa mereka membutuhkan sistem yang sederhana, bisa dijalankan melalui perangkat HP, dan mudah diperbarui secara berkala. Hal ini menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi bukan hanya pada aspek teknologi, melainkan juga pada aspek kapasitas vokasional SDM pengelola. Kurangnya keterampilan dalam menggunakan aplikasi dasar seperti Excel atau Google Sheets menjadi penghambat utama dalam proses digitalisasi laporan.

Temuan ini memperkuat hasil studi sebelumnya oleh Piola (2024), yang menyatakan bahwa lembaga berbasis masyarakat sering kali mengalami hambatan akses pendanaan karena lemahnya tata kelola dan pelaporan keuangan. Jika sistem disesuaikan dengan kebutuhan lokal, adopsi teknologi akan lebih efektif. Hal ini juga ditegaskan oleh Suyitno (2025) bahwa pelatihan berbasis praktik langsung (hands-on) mampu meningkatkan literasi digital keuangan pada masyarakat desa.

Kondisi LPHD Dariaga Mudae menunjukkan pentingnya pendekatan vokasional dalam merancang intervensi digitalisasi keuangan. Bukan hanya menyediakan sistem atau aplikasi, tetapi juga melakukan pendampingan intensif agar pengelola memahami fungsi, manfaat, dan alur penggunaannya. Digitalisasi bukan semata soal teknologi, melainkan perubahan cara berpikir dalam membangun akuntabilitas lembaga. Oleh karena itu, upaya perbaikan sistem keuangan harus dibarengi dengan penguatan kapasitas individu dan kelembagaan secara menyeluruh.

Dengan tidak adanya sistem pelaporan keuangan digital yang layak, LPHD menjadi tertutup dari berbagai peluang kolaborasi, baik dengan pemerintah daerah, LSM, maupun sektor swasta. Digitalisasi laporan keuangan bukan hanya kebutuhan administratif, melainkan prasyarat dasar untuk membuka kepercayaan dan partisipasi stakeholder dalam mendukung keberlanjutan kelembagaan pengelola hutan desa.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterbatasan dalam penyusunan dan digitalisasi laporan keuangan di LPHD Dariaga Mudae menjadi faktor utama yang menghambat dukungan pendanaan dari stakeholder eksternal. Ketiadaan laporan keuangan yang terdokumentasi dengan baik menyebabkan rendahnya transparansi lembaga dan menurunkan tingkat kepercayaan dari instansi pemerintah maupun mitra potensial. Pengumpulan data melalui wawancara dengan Ketua LPHD dan Kepala Desa menunjukkan bahwa pengelola menyadari pentingnya laporan keuangan digital, namun menghadapi kendala teknis serta minimnya kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola pencatatan berbasis digital. Oleh karena itu, penguatan tata kelola keuangan harus dibarengi dengan pendekatan vokasional melalui pelatihan dan pendampingan sistem keuangan yang sederhana dan relevan dengan kondisi lapangan.

Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan dua narasumber kunci sebagai sumber data, sehingga sudut pandang yang diperoleh masih terbatas pada pengurus internal LPHD dan pemerintahan desa. Selain itu, tidak dilakukan validasi eksternal melalui stakeholder seperti instansi pemberi bantuan atau lembaga donor yang terkait langsung dengan

proses pendanaan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak informan dari pihak eksternal, serta memperluas pendekatan ke lembaga desa lain yang menghadapi tantangan serupa, agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang hubungan antara sistem keuangan digital dan akses pendanaan komunitas berbasis hutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Ketua LPHD Dariaga Mudae dan Kepala Desa Darunu atas waktu, dukungan, dan informasi yang telah diberikan selama proses pengumpulan data dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang turut berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan hasil yang bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariesta, A., Pratama, A., & Wildanah, F. (2025). Sistem Administrasi Keuangan Sekolah Berbasis Digital Untuk Meningkatkan Efektifitas Pendidikan Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 02(01), 343–349.
- Evi Yuanita, & Bambang Suripto. (2022). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Organisasi Nonlaba. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 438–455. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i2.18674>
- Fajar, N. R., & Hardianto, G. (2015). Hutan untuk Kesejahteraan. In *Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*.
- Hanif, M., Nurdin, R., & Syahputra, H. (2024). Akuntabilitas Perencanaan dan Tata Kelola Anggaran (Studi Kasus Pada Pembangunan Mesjid Agung Al Falah Sigli). *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sekretari*, 9(2), 106–121.
- Lamato, R. M., Syahid, R., & Amran, M. A. D. S. (2024). *Teknologi Wirausaha: Inovasi dan Kreatifitas Dalam Wirausaha Desa (BUMDes)*.
- Mahendra, G. S., Gede, P., & Cipta Nugraha, S. (2021). Pelatihan Perangkat Desa Dalam Penggunaan Sistem Pengaduan Online Berbasis Web (Ec-Resolver) Untuk Menuju Desa Digital. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(3), 918–929. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/4993>
- Muhammad, F., & Arsyad, R. A. S. (2024). Analisis Keterkaitan Penegakan Hukum Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi Untuk Mewujudkan Tata Kelola Instansi Pemerintahan Yang Bersih. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), 500–512.
- Nurgholis, Z., & Sutabri, T. (2025). Analisis Kebutuhan Petani sebagai Dasar Perancangan Prototipe Aplikasi Penjualan Karet Berbasis Mobile dengan Pendekatan Rapid Application Development (RAD) di Desa Lubuk Karet mereka dalam proses penjualan . Dalam konteks ini , teknologi informasi berp. *Publikasi Teknik Informatika Dan Jaringan*, 3(1), 25–49.
- Piola, M. P. S., & Mauli, S. A. (2024). Model Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Hibah Masjid Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Pendahuluan. *Gorontalo Accounting Journal*, 7(2), 393–399. <https://doi.org/10.32662/gaj.v7i2.3811>
- Setiadi, A., Mulyaningsih, & Ulumudin, A. (2025). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Pasrtisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa. *Ministrate*, 7(1), 58–79. <https://doi.org/10.15575/jpbd.v7i1>
- Silalahi, H., Silalahi, D., Tarigan, M., & Barus, B. (2025). *Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Sederhana Untuk Umkm Dalam Mendukung Pengelolaan Keuangan Berbasis Digital*.



5(2), 588–593.

Suyitno, Wahyuningsih, Y., Elsania, A. D., & Putri, S. A. (2025). PELATIHAN INTERAKTIF UNTUK MENINGKATKAN LITERASI DIGITAL DAN PENGUATAN EKONOMI KELUARGA BAGI ANGGOTA PIMPINAN RANTING ‘ AISYIYAH SEDAYULAWAS , JAWA TIMUR. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 9(3), 2–6.
